

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah gerakan Mahasiswa Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunah, didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 maret 1964 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1384 H. dipelopori oleh tiga orang pemuda yaitu: Djasman Al-kindi, Rosyad Sholeh dan Soedibyo Markoes. IMM diresmikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang ketika itu diketuai oleh KH. Ahmad Badawi (Profil IMM, 1964). Kelahiran IMM tidak lepas kaitannya dengan sejarah perjalanan Muhammadiyah, dan juga bisa dianggap sejalan dengan faktor kelahiran Muhammadiyah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap hal yang dilakukan Muhammadiyah merupakan perwujudan dari keinginan Muhammadiyah untuk memenuhi cita-cita sesuai dengan kehendak Muhammadiyah dilahirkan. Disamping itu juga merupakan respon atas persoalan-persoalan keumatan dalam sejarah bangsa ini pada awal kelahiran IMM, sehingga kehadiran IMM sebenarnya merupakan sebuah keharusan sejarah. Kalangan Muhammadiyah telah dimulai sejak lama, semangat tersebut sebenarnya telah tumbuh dengan adanya keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah pada Kongres Abad Muhammadiyah di Betawi Jakarta tahun 1936. Pada saat itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah diketahui oleh KH.Hasyim (periode 1934-1937).

Gagasan pembinaan kader dilingkungan mahasiswa dalam bentuk penghimpunan dan pembinaan langsung adalah selaras dengan kehendak pendiri Muhammadiyah, KHA.Dahlan, yang berpesan bahwa dari kalian nanti akan ada yang jadi Dokter, Master, Insinyur, tetapi kembali kepada Muhammadiyah (Suara Muhammadiyah nomor 6 tahun ke-68 Maret 1988, halaman 19). Gagasan untuk mewadahi mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah dalam satu himpunan setidaknya telah menjadi polemik dilingkungan Muhammadiyah sejak lama. Setelah mengalami polemik yang cukup serius tentang gagasan untuk mendirikan IMM, maka pada tahun 1956 polemik tersebut mulai mengalami pengendapan. Tahun 1956 disebut sebagai tahap awal bagi embrio operasional pendirian IMM dalam bentuk pemenuhan gagasan penghimpunan wadah mahasiswa dilingkungan Muhammadiyah.

Pertama, pada tahun itu 1956 Muhammadiyah secara formal membentuk kader terlembaga yaitu BPK. Kedua, Muhammadiyah pada tahun itu telah bertekad untuk kembali pada identitasnya sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar (tiga tahun sesudahnya, tahun 1959, dikukuhkan dengan melepaskan diri dari komitmen politik dengan Masyumi, yang berarti bahwa Muhammadiyah tidak harus mengakui bahwa tidak satu-satunya organisasi mahasiswa Islam di Indonesia adalah HMI. Ketiga, perguruan tinggi Muhammadiyah telah banyak didirikan. Keempat, keputusan Muaktamar Muhammadiyah bersamaan pemuda Muhammadiyah tahun 1959 di Palembang menghimpun pelajar dan mahasiswa Muhammadiyah agar kelak menjadi pemuda

Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah yang mampu mengembangkan amanah. Tahun 1961, menjelang Muaktamar Muhammadiyah setengah abad di Jakarta, diselenggarakan Kongres Mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta. Saat itu, Muhammadiyah sudah mempunyai perguruan tinggi Muhammadiyah sebelas buah yang tersebar diberbagai kota. Dengan demikian, Lembaga Dakwah Muhammadiyah yang banyak dimotori oleh para mahasiswa Yogyakarta, inilah yang menjadi embrio lahirnya IMM dengan terbentuknya IMM lokal Yogyakarta (Profil IMM, 1964)

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meresmikan berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada tanggal 29 Syawal 1384 H atau 14 maret 1964 M. penandatanganan Piagam Pendiri ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dilakukan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat itu oleh KHA Badawi, dengan resepsi peresmian IMM dilaksanakan di Gedung Dinoto Yogyakarta. Tujuan akhir kehadiran IMM untuk pertama kalinya ialah membentuk akademisi Islam dalam rangka melaksanakan tujuan Muhammadiyah, sedangkan aktivitas IMM pada awal kehadirannya yang paling menonjol ialah kegiatan keagamaan dan pengkaderan.

a. Ikatan

Kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota surakarta pada tanggal 14 maret 1964 atas prakarsa Djsaman al Kindi, Sudibyo Markus, dan Rausyad Soleh, karena sikap aktivis muda Muhammadiyah yang tidak puas

dengan keadaan dan polarisasi ideologi yang memasukkan paham komunisme dalam berbagai dimensi kehidupan.

b. Tujuan Ikatan

Ikatan merupakan suatu orthonom dari organisasi sosial kemasyarakatan Muhammadiyah, oleh karena itu yang dilakukan ikatan adalah pencerminan dari Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah dalam gerakannya menggambarkan kondisi masyarakat yang ideal.

c. Semboyan Ikatan

Ikatan sebagai organisasi juga memiliki simbol dalam rangka pembacaan terhadap realitas. Oleh karena itu, memerlukan tafsiran lain dalam rangka memahami simbol yang ia ciptakan agar memperoleh makna simbol tersebut. Simbol yang berada pada manusia sangat diperlukan untuk mengenalkan dirinya dengan yang lain.

d. Trilogi ikatan

Trilogi ikatan merupakan lahan juang dan simbol ikatan dalam melakukan transformasi sosial. Trilogi ikatan merupakan hal penting, dikarenakan dalam trilogi memiliki makna yang kompleks, sebagai roh ikatan dalam menilai diri, dan cara melakukan transformasi sosial

Ikatan sebagai sebuah organisasi memiliki tugas dalam rangka melakukan transformasi sosial. Ikatan merupakan gerakan kemahasiswaan yang basis kadernya adalah mahasiswa yang memiliki kultur berbeda dengan pergerakan lain. Gerakan ikatan masih dalam lingkungan Muhammadiyah

untuk bangsa dan Agama Islam. Oleh karena itu, perlu mengedepankan bidang atau garapan yang tertuang dalam trilogi IMM, kemahasiswaan, keagamaan dan kemasyarakatan. Trilogi yang dimiliki oleh ikatan ini merupakan tugas berat buat kader-kader IMM untuk melaksanakan ketiganya sebagai cerminan dalam gerakan transformasi sosial. Dalam sejarah munculnya, trilogi ikatan merupakan pengambilan intisari dalam deklarasi ikatan pada waktu Muktamar IMM di Solo, ada beberapa deklarasi solo, yaitu:

- 1) IMM adalah gerakan mahasiswa Islam.
- 2) Kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM.
- 3) Fungsi IMM adalah sebagai eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah (stabilisator dan dinamisator).
- 4) Ilmu adalah amaliyah IMM dan amal adalah ilmiah IMM.
- 5) IMM adalah organisasi yang sah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan dan falsafah Negara yang berlaku.
- 6) Amal IMM dilahirkan dan diabdikan untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa.

e. Realitas ikatan

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi kader dan pergerakan. Ikatan sebagai organisasi kader karena ia dilahirkan dan tidak dapat dilepaskan dari Muhammadiyah. Sedangkan ikatan sebagai organisasi pergerakan dapat dilihat dari latar belakang dan sejarah gerakan mahasiswa

yang memiliki kepekaan dan responsibilitas terhadap fenomena keilmuan serta perpolitikan.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berlatar belakang aktivis muda Muhammadiyah memiliki kecenderungan yang sama dengan arus muda Muhammadiyah yang terkena kebudayaan instant, berpikir pragmatis, serta arus globalisasi menjadikan apa yang dipilih oleh ikatan pun akan bersifat sama.

f. Nilai Dasar Ikatan

Ikatan dalam pergerakannya dengan sebuah nilai dasar ikatan, sebagai ruh mewujudkan khairul ummah, yaitu:20

- 1) IMM adalah gerakan mahasiswa yang bergerak pada tiga bidang, keagamaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan. 2. Segala bentuk gerakan IMM tetap berlandaskan pada agama islam yang hanif dan berkarakter rahmat bagi sekalia alam.
- 2) Segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan kemungkar adalah lawan besar gerakan IMM, perlawanan terhadapnya adalah kewajiban setiap kader IMM.
- 3) Sebagai gerakan mahasiswa yang berdasarkan islam dan berangkat dari individu-individu mukmin, maka kesadaran melakukan syariat Islam adalah suatu kewajiban sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk mendakwahkan kebenaran ditengah masyarakat.

- 4) Kader IMM merupakan inti masyarakat utama, yang selalu menyebarkan cita-cita kemerdekaan, kemuliaan dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan semangat pembebasan dan pencerahan yang dilakukan Nabiullah Muhammad saw.

Organisasi kemahasiswaan merupakan bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan juga sebagai wadah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa itu sendiri. Hal ini dikuatkan oleh (Kepmendikbud RI. No. 155/U/2021) Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, bahwa: Organisasi kemahasiswaan *intra*-perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi organisasi kemahasiswaan terdiri dari:

- a. Organisasi kemahasiswaan *intra-universiter*, disebut juga organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi, adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan. Bentuk-bentuk organisasi kemahasiswaan itu antara lain:

- a) Senat mahasiswa perguruan tinggi (SMPT), merupakan wadah atau badan normatif dan perwakilan tertinggi mahasiswa dengan tugas pokok

mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat perguruan tinggi.

- b) Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM), merupakan wadah kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi, yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian masyarakat. Sebagai contoh ada unit kegiatan untuk olahraga seperti basket, sepak bola, bela diri; ada juga unit kegiatan untuk kesenian seperti panduan suara, budaya tradisional.
- c) Himpunan mahasiswa jurusan, merupakan wadah kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi, yang bersifat penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan program studi pada jurusan.

- b. Organisasi kemahasiswaan *ekstra-universiter*, yaitu organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di luar perguruan tinggi tertentu, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan lain-lain.

B. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada Informan sebagai pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada Manajemen Komunikasi Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat

suatu kondisi alami dari sebuah fenomena yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang kompleks.

Penelitian ini melibatkan 4 Informan yaitu: Abdul Musawir Yahya sebagai Ketua Umum DPP IMM, Abdulah S Toda sebagai ketua bidang Organisasi DPP IMM, Fajrus Shodiq sebagai ketua bidang Kader, Baikuni Alsafa sebagai ketua bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada ke-empat Informan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Manajemen Komunikasi Kebijakan DPP IMM di masa pandemi Covid-19.

DPP IMM berfungsi sebagai pembuat kebijakan, aturan organisasi yang mencakup seluruh tingkatan pimpinan organisasi dibawahnya Pada masa pandemi Covid-19 dengan semua aturan yang dikeluarkan pemerintah, tentunya membuat aktivitas pokok organisasi tidak bisa dijalankan. Hambatan aturan selama pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya aktivitas pokok organisasi tidak bisa dijalankan seperti perekrutan anggota diantaranya Darul Arqom Dasar (DAD), Darul Arqom Madya (DAM) dan Darul Arqom Paripurna (DAP). Selain agenda perekrutan agenda musyawarah yang menjadi tempat pergantian kepemimpinan organisasi IMM juga tidak bisa dilaksanakan seperti (MUKTAMAR, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah komisariat). Hal ini tidak bisa dilaksanakan pada masa awal pandemi Covid-19. Akhirnya berdampak pada jumlah anggota dan terhambatnya regenerasi/pergantian kepemimpinan. DPP IMM kemudian mengeluarkan kebijakan organisasi pada masa pandemi Covid-19 baik kebijakan yang menyangkut perekrutan anggota, kegiatan keilmuan dan kegiatan yang menyangkut musyawarah

sebagai agenda regenerasi/pergantian kepemimpinan. Fakta dilapangan yang di dapatkan dalam penelitian ini dari kebijakan yang dikeluarkan DPP IMM pada masa pandemi Covid-19 membuat segala aktivitas organisasi berjalan normal kembali, bahkan ditemukan fakta adanya kenaikan jumlah Pimpinan Cabang, dan penambahan Dewan Pimpinan Daerah serta Pimpinan Komisariat dimasa pandemi Covid-19.

Manajemen komunikasi DPP IMM dimasa pandemi yang terintegrasi terhadap bagian dalam organisasi yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan dalam organisasi, diantaranya, pimpinan umum (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum), Bidang Organisasi, Bidang Kader, Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik melakukan pengambilan kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan tersebut dimasa pandemi Covid-19, berdampak pada pulih dan berkembangnya IMM dimasa pandemi Covid-19 pada tingkat DPD, PC dan PK.

Terkait teori Manajemen komunikasi yang menjadi landasan dalam penelitian ini seperti yang dikemukakan oleh Robert E. Simmons yang terdiri dari empat aspek. Adapun hasil dari penelitian dapat di paparkan sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pengurus DPP IMM pada aspek perencanaan, mencangkup tujuan dari kebijakan organisasi, sasaran utama organisasi, dan langkah-langkah strategi organisasi pada masa pandemi serta perenanaan dalam menyusun kebijakan organisasi dimasa pandemi Covid-19. Pengurus DPP IMM menyebut tujuan utama organisasi adalah untuk menciptakan mahasiswa yang intelektual, religius, kritis dan beradab, dengan tetap melakukan karya-karya sejalan

dengan misi Muhammadiyah melakukan pencerdasan, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui IMM sebagai penyambung dakwahnya pada kalangan mahasiswa.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya terkait tujuan dan sasaran organisasi disampaikan dalam paparan hasil wawancara sebagai berikut :

“IMM ini adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang berbasis ke Islaman yang berorientasi kepada gerakan pencerdasan terutama pada kalangan mahasiswa. IMM sebagai salah satu organisasi otonom dibawah naungan Muhammadiyah, tentu mempunyai tujuan, dan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, tujuan muhammadiyah itu sendiri garis besarnya adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini bagaimana IMM sebagai sarana bagi mahasiswa untuk cerdas, beradab, terutama sebagai tempat mengasah fikir kritis dan melakukan karya-karya. Intinya IMM oreintasinya agar mahasiswa ini menjadi manusia yang sempurna terutama dalam melaksanakan peran-peran kemanusiaannya” (Wawancara 20 November 2022, Abdul Musyawir Yahya).

Hal yang sama juga diungkapkan bahwa tujuan utama organisasi adalah untuk melahirkan kader yang intelektual, kritis dan solutif sebagai penyambung dakwahnya Muhammadiyah dikalangan mahasiswa. Sebagaimana dijelaskan Fajrus Shodik, sebagai berikut:

“IMM itu organisasi kemahasiswaan tentunya, salah satu organisasi otonom muhammadiyah yang berorientasi kepada penyambung dakwah muhammadiyah dikalangan mahasiswa, sehingga IMM melahirkan intelektual yang kritis dan solutif, berakhlak mulia. Nanti ujungnya tetap pada tujuan muhammadiyah yang terciptanya masyarakat islam yang sebenar-benarnya” (Wawancara, 22 November 2022, Fajrus Shodik).

Adapun langkah-langkah pengembangan strategi dan kebijakan organisasi dijelaskan oleh Narasumber yang lain, dimana pengembangan strategi dan kebijakan organisasi dimasa pandemi Covid-19, untuk mempertahankan aktivitas organisasi yaitu dengan cara memanfaatkan media online dan merubah secara teknis bentuk aturan kegiatan. Pada masa pandemi Covid-19 dijelaskan bahwa adanya hambatan dalam melakukan aktivitas pokok organisasi seperti melaksanakan perkaderan, agenda permusyawaratan dimana tata pelaksanaannya masih menggunakan cara tatap muka. Oleh karena itu DPP IMM mengeluarkan kebijakan berupa pemaksimalan sistim online dalam mengganti sistem tatap muka sebagai Strategi baru dalam mengantisipasi kebutuhan aktivitas organisasi dimasa pandemi covid 19.

Sebagaimana disampaikan oleh ketua bidang organisasi DPP IMM Abdullah S Toda sebagai berikut:

“Kalau bicara target, tentunya yang paling diinginkan bagaimana organisasi ini tetap berjalan ditengah keadaan apapun, karena itu kebijakan dan pola organisasi harus terus di update sesuai dengan kebutuhan zaman. Selama masa pandemi dan sampai saat ini kami pun sering melakukan rapat dengan cara online, tentunya ini dimulai dari masa pandemi covid 19 kemarin. Kebijakan yang paling penting dimasa pandemi itu bagaimana mekanisme perkaderan dan permusyawaratan yang selama ini belum pernah diatur. Tata pelaksanaannya yang masih secara tatap muka membuat agenda-agenda wajib itu terhambat. Bahkan beberapa saat waktu awal-awal covid kami lumpuh secara organisasi. Melakukan perekutan tidak bisa, melaksanakan agenda internal tidak bisa, sehingga pola kaderisasi tidak berjalan. Maka dikeluarkan kebijakan yang baru seperti bisa melakukan perekaderan dengan cara online, atau melakukan musyawarah komisariat dengan peserta terbatas dan menggunakan Zoom membuat aktivitas organisasi berangsur pulih bahkan bisa berkembang pesat di masa pandemi” (Wawancara 27 November 2022, Abdullah S Toda).

Selanjutnya tentang perencanaan kebijakan disampaikan oleh Narasumber Abdul Musyawir Yahya, dimana kebijakan harus segera diambil dalam rangka agar komunikasi dan aktivitas organisasi tetap berjalan selama pandemi Covid-19, dalam membuat perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut DPP IMM melibatkan semua pengurus organisasi diberbagai tingkatan kepengurusan, dimana hal tersebut bertujuan untuk perencanaan program dan kebijakan yang bisa dilaksanakan diberbagai tingkat kepengurusan. Keterlibatan kepengurusan tersebut dalam penyempaian rencana kebijakan dimulai dari pengkoordinasian informasi struktural yang dimulai dari DPD sampai komisariat dengan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA), Rapat Koordinasi Cabang (RAKORCAB) dan rapat koordinasi komisariat. Setelah koordinasi perencanaan tersebut disampaikan kemudian DPP IMM menetapkan perencanaan tersebut menjadi sebuah ketetapan aturan dan kebijakan didalam rapat pleno, yang nantinya disahkan dan disampaikan kembali kepada masing-masing tingkat kepengurusan.

Sebagaimana disampaikan oleh ketua umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya sebagai berikut:

“Ada beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan DPP IMM di masa pandemi covid 19. Pertama tentang memperbolehkan melaksanakan aktivitas kaderisasi secara online yang selama ini dilakukan komunikasinya secara langsung, awalnya kita rencanakan dengan melaksanakan rapat bersama pengurus yang lain, dimana harus ada penyesuaian kebijakan baru pada masa pandemi Covid-19, seingat saya waktu awal mulanya rekan-rekan di DPP ini rapat lalu mengusulkan kebijakan merumuskan dengan cara online seperti tata cara kebijakan dalam melakukan perkaderan dan kegiatan lainya dengan cara online ini, langsung menelpon para ketua-ketua DPD untuk seterusnya akan diadakan rapat pleno online gabungan waktu itu. Hasil rapat setelah itu barulah kita bersurat secara formil keorganisasian mensosialisaikan

bagaimana melakukan perkaderan secara online seperti menggunakan zoom meeting, kemudian masa kaderisasi yang biasanya lima hari dijadikan tiga hari, baru setelah pandemi agak mereda, kita juga rumuskan bagaimana memberlakukan sistem hibryd, baru kemudian pengurus DPD yang melanjutkan komunikasinya kepada pengurus cabang-cabang dengan menggelar rakorda (rapat koordinasi daerah.) Peserta nya adalah DPD dan cabang, kemudian media penyampai kebijakan itu melalui rakorcab (rapat koordinasi cabang) dimana ini pesertanya adalah para pemimpin komisariat, yang nantinya akan melanjutkan komunikasi kebijakan ini kepada sampai kader akar rumput. Begitu model IMM dalam mengkomunikasikan kebijakannya pada masa pandemi covid kemarin. Kalau selama pandemi lumayan mempermudah proses pendirian cabang dan komisariat kita imm karena pada waktu itu kan semua mahasiswa online dan didaerahnya masing-masing juga” (Wawancara 20 November 2022, Abdul Musyawir Yahya).

Memperkuat data yang diperoleh dari informan untuk keseimbangan atau tidak subjektivitas data penelitian maka dilakukan juga wawancara dengan informan diluar internal organisasi DPP IMM, sebagai triangulasi sumber yang ada Najih Prastiyo sebagai Pengurus Pemuda Muhammadiyah menyampaikan bahwa dalam menjalankan aktivitas organisasi DPP IMM pastinya melakukan perencanaan. Kemudian, perencanaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan strategi-strategi yang bersumber dari hasil kajian terkait persoalan atau kondisi tertentu. Dipaparkan sebagai berikut:

“Setahu saya setiap organisasi pasti memiliki tujuan apalagi IMM, kalau bicara tentang DPP IMM dalam merumuskan kebijakan biasanya pada tahap awal itu mereka melakukan advokasi atau pengumpulan bahan terkait perencanaan kebijakan apa yang akan diambil. Lalu baru ditentukan strategi nah biasanya diskusi melibatkan semua pengurus, memang benar bahan dari kajian tersebut didapat dari hasil investigasi DPP IMM dengan kepengurusan dibawahnya. Dalam merumuskan strategi organisasi, biasanya disesuaikan dengan kondisi persoalan yang ada, saya lihat di DPP IMM Periode ini perencanaan mereka dan strategi mereka dalam mengeluarkan kebijakan cukup akurat dan terukur” (Wawancara 12 Februari 2023, Najih Prastiyo).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, DPP IMM dalam menentukan tujuan, langkah-langkah pengembangan strategi dalam menetapkan kebijakan organisasi, dalam hal perencanaan yaitu dengan menggunakan pemanfaatan media online, dengan melakukan koordinasi yang intensif dimasing-masing tingkatan kepengurusan. Aktivitas rapat yang membicarakan tentang perencanaan program dan kebijakan baru melibatkan pimpinan organisasi dilakukan dengan cara *zoom meeting* hal ini dilakukan untuk menjaga aktivitas organisasi agar tetap berjalan selama dimasa pandemi Covid-19.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pada aspek pengorganisasian pertanyaan spesifik penelitian tentang aktivitas organisasi, kebutuhan organisasi dalam mengeluarkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dalam penelitian ini juga menanyakan tentang pembagian tugas dan pendelegasian wewenang sesuai dengan kebijakan organisasi dimasa pandemi Covid-19. Pada perorganisasian kebijakan pengurus DPP IMM melakukan kajian-kajian terlebih dahulu terhadap persoalan yang dihadapi dengan melakukan rapat pembahasan terkait dengan masalah organisasi yang ditimbulkan karena Covid-19, kemudian merumuskan pembagian tugas dimasing-masing tingkat kepengurusan yang ada di IMM baik tingkatan Daerah, Cabang, Komisariat dan bidang-bidang terkait. Pembagian tugas dan wewenang

terkait dengan kebijakan tersebut disampaikan melalui media online seperti *Whatsaap Group, Email* dan media lainnya.

Berikut paparan hasil wawancara dengan ketua bidang Organisasi Abdullah S Toda sebagai berikut :

“Secara sumber daya IMM ini sangat banyak ya mbak, apalagi kita tidak pernah berhenti dalam perekrutan anggota, ditambah dengan punya basis kampus yang jelas. Maka sudah pasti sumber daya kita sangat stabil, baik di DPP, di DPD, cabang komisariat. Maka kami di DPP ini harus kerja keras dalam merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi, yang berguna untuk menjaga regenerasi sumber daya itu tadi. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digitalkan mbak, maka kami dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini merumuskan kebijakan yang memanfaatkan dunia digital, seperti misalnya di bidang organisasi sendiri penerbitan kartu anggota secara online salah satunya. Kemudian juga melakukan agenda-agenda rapat yang juga memanfaatkan *zoom meeting*, bahkan untuk mempermudah koordinasi dengan pengurus-pengurus daerah dalam hal administrasi kami sekarang hampir seratus persen itu menggunakan email, yang dulu itu biasanya di kirim via pos, grup-grup whatsapp. Kami melakukan kebijakan itu dalam rangka mempermudah akses administrasi yang bertujuan juga untuk kelancaran organisasi, apalagi dimasa pandemi kemarin, kebijakan yang kami keluarkan tersebut sangat membantu kami dalam tetap menjalankan aktivitas organisasi agar tetap berajalan. Sebelum kebijakan tersebut kami lakukan, terlebih dahulu kami melakukan pembahasan dengan melakukan rapat, baik itu di DPP sendiri maupun dengan melibatkan DPD nya mbak, agar informasi mengenai kebijakan ini bisa dimengerti dan dilaksanakan dengan tetap sasaran dan sesuai target yang sudah kami rencanakan itu, gitu mbak” (Wawancara 27 November 2022, Abdullah S Toda).

Secara pengorganisasian kebijakan, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau *Kolektif Kolegial* yang kemudian dilakukan analisis-analisis terutama tentang perlunya sebuah kebijakan diambil yang dilakukan secara online. Sebuah keputusan mengenai kebijakan DPP IMM melakukan rapat yang berisi tentang laporan dan analisis permasalahan yang diperoleh dari bidang-bidang terkait.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan hal ini juga disampaikan oleh Fajrus Shodiq selaku ketua bidang Kader DPP IMM dapat dipaparkan sebagai berikut :

“Tentunya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan IMM ini menggunakan musyawarah mufakat , atau kolektif kolegial mbak. Namun dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan DPP IMM ini, melakukan analisis-analisis terutama tentang perlunya sebuah kebijakan diambil. Biasanya kami melakukan kajian terkait dengan penyebab suatu masalah , yang nantinya biasanya akan di persentasikan oleh pimpinan-pimpinan yang ada dipengurusan. Pun juga dengan waktu dari masalah itu juga menjadi pertimbangan, akibat dari peristiwa tersebut dan sebagainya mbak, contohnya covid kemarin, bagaimana saya menyampaikan kepada pimpinan tentang pentingnya dilakukan kajian terhadap dampak dari waktu covid, sebab yang akan diterima oleh organisasi manakala kebijakan tidak diambil. Setelah adanya kajian-kajian tersebut yang berangkat dari fenomena, maka kami DPP IMM barulah merumuskan solusi yang tepat mengenai masalah tersebut mbak contohnya covid ya mbak, kami merumuskan regulasi serba online untuk menagantisipasi penyebab besar dari covid terhadap organisasi manakala kebijakan tidak diambil. Nah setelah kebijakan diambil barulah kami tetapkan dengan musyawarah dan mufakat” (Wawancara 4 Desember 2022, Fajrus Shodiq).

Kemudian melanjutkan pertanyaan tentang pembagian tugas dan wewenang organisasi pengurus DPP IMM, hasil wawancara mengungkapkan bahwa dalam menjalankan kebijakan dimasa pandemi Covid-19 kebijakan yang telah dibuat tersebut di masing-masing tingkat pimpinan maupun bidang-bidang didalam organisasi mempunyai tugas masing-masing. Dimulai dari DPD hingga komisariat, dimana DPP sebagai pembuat kebijakan sekaligus mengontrol dan mengawasi kebijakan dan pengurus dibawahnya sebagai pelaksana kebijakan yang telah dibuat. Dalam pendelegasian tugas secara khusus juga diberikan kepada bidang-bidang terkait diberbagai tingkatan kepemimpinan terutama dalam pelaksanaan

kebijakan sekaligus sebagai pemberi masukan dimana jika terdapat kendala dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Sebagaimana disampaikan oleh ketua bidang Organisasi Abdullah S Toda dipaparkan sebagai berikut :

“Kalau struktur kita kan, dari DPP, DPD, PC, dan PK mbak, masing-masing tingkatan kepemimpinan tersebut tentunya mempunyai peran masing-masing. Seperti DPP dia fokus kepada kebijakan dan konsep, pembaharuan arah gerakan secara nasional, sedangkan DPD itu dia lebih kepengawasan sekaligus pelaksana kebijakan berbasis lokal, artinya di wilayah masing-masing mereka berada, sedangkan cabang dan komisariat ini mereka bertugas melaksanakan kebijakan sekaligus sebagai media dalam merekrut anggota, agenda-agenda kaderisasi ini biasanya di urusi oleh cabang dan komisariat mbak. Semua tingkat kepemimpinan saling berkoordinasi mulai dari DPP sampai ke PK. Ditambah lagi dalam strukturalnya di IMM ini ada bidang-bidang yang berkerja dan berfungsi sesuai dengan tugasnya. Seperti, bidang kader fokusnya di wilayah perkaderan, bidang organisasi, fokusnya kewilayah administrasi organisasi, bidang hikmah, fokusnya pada wilayah persoalan politik, bidang keilmuan, fokusnya pada pengembangan keilmuan kader, bidang immawati fokusnya pada ranah pergerakan ke perempuananan di IMM dan seterusnya. Artinya bidang-bidang yang ada di struktur ini sebagai pelaksana teknis dan konsep khusus organisasi mbak yang nantinya masuk pada bagian program kerja itu sendiri. Pada masa pandemi covid kemarin, masing-masing bidang ini menurut saya sangat ekstra bekerjanya, alhamdulillah di DPP ini mbak kita sudah akrab dengan dunia digital, maka ketika covid datang, kita dan bidang-bidang yang lain, betul-betul memaksimalkan media sosial ini dalam berkegiatan. Tim medianya juga ada dikita mbak” (Wawancara dengan Abdullah S Toda).

Hasil wawancara bersama Fajrus Shodiq selaku ketua bidang kader juga membenarkan tentang pembagian tugas dan wewenang terutama dalam melaksanakan agenda perkaderan khususnya dibidang kaderisasi, baik itu perekrutan anggota maupun tingkat perkaderan lainnya. Kemudian pengawasan yang intensif melalui bidang terkait diawasi secara ketat dengan melakukan koordinasi dengan pemanfaatan ,media online hal ini dilakukan agar kebijakan

yang dijalankan oleh pengurus sesuai substansi dan tujuan awal dari sebuah kebijakan itu dikeluarkan.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Fajrus Shodiq ketua bidang Kader DPP IMM dipaparkan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya kesulitannya diawal saja mbak, yaitu mensinkronisasikan gerakan yang serba online ini mbak, karena kan kemampuan kader terhadap pemanfaatan atau penggunaan media sosial ini kan tidak sama. Maka kami mempunyai tugas besar dalam pengawasan dan mengarahkan agar kebijakan yang kami buat, tidak keliru diterapkan di daerah masing-masing. Kalau saya dibidang kader, formulasi perkaderan itu selain melibatkan bidang kader diberbagai tingkat, saya juga berkoordinasi dengan para instruktur agar kebijakan yang dipermudah dalam melaksanakan perekrutan anggota atau perkaderan lainnya tidak kehilangan substansinya. Misalnya kebijakan perkaderan dengan memperbolehkan online dengan dibatasi waktunya. mengantisipasi hal itu saya berkoordinasi dengan instruktur untuk melakukan pendampingan intensif, pembinaan lewat metode-metode dialog yang aktif, kajian-kajian sesering mungkin pasca melakukan agenda perkaderan, dan tugas-tugas individu, ini bertujuan menopang kompetensi kader karena perubahan regulasi tersebut mbak. Kalau pimpinan seperti ketua umum arahnya tentunya bersifat global, dimana kebijakan yang dibuat dimasa pandemi ini bertujuan untuk aktivitas organisasi bisa berjalan, oleh karena itu tugas-tugas kongkrit seperti arahan teknis itu diterjemahkan oleh bidang-bidang yang terkait. Seperti saya dibidang kader, saya bertugas bagaimana kebijakan yang diambil dimasa pandemi covid 19 kemarin terlaksana dengan baik. Maka saya dengan seluruh bidang kader se Indonesia ini, terus memantau dalam grup kami terkait intensitas perkaderan dan keaktifan para instruktur ini. Misalnya tema perkaderan, jam-jam pemberian materi, tugas instruktur ini saya awasi betul mbak, bentuk pengawasan saya ini, saya sampaikan lewat arahan dan komunikasi aktif kepada bidang kader dan instruktur, semisal ada hambatan, hambatan nya apa saja, maka saya akan mengadvokasi, dan memberikan solusi” (Wawancara 4 Desember, Fajrus Shodiq).

Adapun Kebijakan dan pendelegasian wewenang serta pengawasan penerapan kebijakan tersebut selama pandemi di sosialisasikan melalui via online, agar diteruskan koordinasinya sampai pada tingkat kepemimpinan paling rendah, hal ini dilakukan untuk menjaga kebijakan tersebut terlaksana dengan akurat dan

tepat. Media online berfungsi sebagai akses dalam penyampaian informasi, sedangkan cara *hibryd* juga dilakukan namun disesuaikan dengan keadaan daerah di masing-masing wilayah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Umum DPP IMM Abdul Musyawir

Yahya di jabarkan sebagai berikut :

“Ada beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan DPP IMM di masa pandemi Covid-19. Pertama tentang memperbolehkan melaksanakan aktivitas kaderisasi secara online yang selama ini dilakukan secara langsung, awalnya kita rencanakan dengan melaksanakan rapat bersama pengurus yang lain, dimana harus ada penyesuaian kebijakan baru pada masa pandemi Covid-19, seingat saya waktu awal mulanya rekan-rekan DPP ini rapat dan mengusulkan kebijakan merumuskan dengan cara online seperti tata cara kebijakan dalam melakukan perkaderan dan kegiatan lainnya dengan cara online ini, langsung menelpon para ketua-ketua DPD untuk seterusnya akan diadakan rapat pleno online gabungan waktu itu. Hasil rapat setelah itu barulah kita bersurat secara formil keorganisasian mensosialisaikan bagaimana melakukan perkaderan secara online seperti menggunakan *zoom meeting*, kemudian masa kaderisasi yang biasanya lima hari dijadikan tiga hari, baru setelah pandemi agak mereda, kita juga rumuskan bagaimana memberlakukan sistem *hibryd*, kemudian pengurus DPD yang melanjutkan komunikasinya kepada pengurus cabang-cabang dengan menggelar rakorda (rapat koordinasi daerah) pesertanya adalah DPD dan cabang, kemudian media penyampai kebijakan itu melalui RAKORCAB (Rapat Koordinasi Cabang) dimana ini pesertanya adalah para pemimpin komisariat, yang nantinya akan melanjutkan komunikasi kebijakan ini kepada sampai kader akar rumput. Begitu model IMM dalam mengkomunikasikan kebijakannya pada masa pandemi covid kemarin. Selama pandemi lumayan mempermudah proses pendirian cabang dan komisariat karena pada waktu itu semua mahasiswa online dan didaerahnya masing-masing juga” (Wawancara 20 November 2022, Abdul Musyawir Yahya).

Kemudian di perkuat dengan jawaban Ketua Bidang Hikmah DPP IMM Baikuni Alsafa dimana setiap bidang yang ada mempunyai tugas khususnya sendiri, yang ditentukan melalui rapat kerja dan rapat pimpinan organisasi sebagai berikut:

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara bersama ketua bidang Hikmah DPP IMM, Baikuni Alsafa dijelaskan sebagai berikut:

“Biasanya kalau hal-hal strategis administratif itu bidang organisasi, tetapi untuk kebijakan strategis yang bersangkutan dengan aktivitas hidup, itu sepertinya semua bidang yang terkait juga terlibat dalam merumuskan kebijakan. Nah forumnya biasanya kami mulai di rapat kerja setelah pelantikan itulah kebijakan awal yang harus dikerjakan oleh DPP IMM. terkait forum pengambilan kebijakan itu, biasanya menggunakan rapat pleno, dimana semua pimpinan baik itu pimpinan umum dan ketua-ketua bidang hadir untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan baru. Kalau mensosialisasikannya biasanya itu dikirim ke email, asing-masing DPD atau ke grup-grup, biasanya gitu” (Wawancara, 21 Desember 2022, Baikuni Alsafa).

Najih Prastiyo dalam hal ini juga membenarkan adanya pengorganisasian dalam mencapai tujuan serta pendelegasian tugas dan wewenang dalam DPP IMM terutama dalam menjalankan kebijakan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Najih Prastiyo sebagai pengurus Pemuda Muhammadiyah dijelaskan sebagai berikut:

“Tentu IMM sebagai sebuah organisasi yang besar selalu mendasari setiap kebijakannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Saya melihat dimasa pandemi covid 19 ini ada banyak kebijakan baru yang dikeluarkan oleh DPP IMM tentunya kebijakan itu dalam upaya mensiasati keadaan, dimana yang saya ketahui bahwa sistim IMM itu semuanya masih berbasis manual, jadi covid kemarin saya lihat ada pergeseran metode yaitunya dari manual ke online. Menurut saya ini salah satu bentuk IMM dalam menyelaraskan kebijakan dengan keadaan situasi demi menjaga aktivitas organisasi tetap terlaksana meski dalam keadaan apapun. Dalam pendelegasian tugas saya kira ini tentunya dibagai berdasarkan tugas dan bidang masing-masing. Jika bersifat struktural administrasi maka tentunya mulai dari DPP hingga komisariat beserta bidangnya akan terlibat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan fungsi dari bidangnya masing-masing” (Wawancara, 12 Februari 2023, Najih Prastiyo Pengurus Pemuda Muhammadiyah).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengorganisasian yang mencakup sasaran yang ingin dicapai dan pendelegasian wewenang, DPP IMM telah melakukan kajian strategis dengan melibatkan seluruh pimpinan dengan berbagai bidang dalam merumuskan target yang akan dicapai organisasi selama masa pandemi Covid-19, dengan pengoptimalan bidang-bidang terkait terutama dalam menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan selama masa pandemi covid 19. Adapun tugas dan wewenang ini dilaksanakan oleh pengurus-pengurus bidang yang sudah terintegrasi disemua tingkatan kepemimpinan.

3. *Directing* (Pengarahan)

Pada pengarahan ini DPP IMM melakukan pengarahan dan komunikasi aktif terhadap pengurus diberbagai tingkatan kepemimpinan dalam memastikan kebijakan yang dikeluarkan. Selama masa pandemi Covid-19 pengarahan dan komunikasi aktif terhadap pengurus berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Pengarahan yang dilakukan dipimpin oleh ketua umum dengan menggunakan metode komunikasi langsung melalui media *telephone* kepada pimpinan dibawahnya, hal ini juga bertujuan untuk menggali informasi dari daerah-daerah untuk bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Musyawir Yahya, ketua umum DPP IMM dijelaskan sebagai berikut :

“Tentunya saya sebagai ketua umum dalam memberikan pengarahan, terlebih dahulu yang saya lakukan adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang saya peroleh dari pengurus-pengurus baik di DPP sendiri atau dari daerah-daerah bahkan sampai pada tataran komisariat , yang kemudian

akan saya dalam sebagai bentuk upaya saya dalam mencari solusi, yang nantinya akan saya sampaikan juga dalam rapat gabungan bersama pengurus yang lain. Dalam pengarahannya berupa konsep ide itu saya sampaikan dalam rapat, sedangkan pengarahannya dalam bentuk kebijakan saya terlibat langsung mengawasi, ya dengan cara saya komunikasi lewat telpon, atau kalau yang formalnya rapat, undangan dari DPD cabang dan komisariat. Jika ada yang tidak berjalan akan saya evaluasi artinya saya sebagai ketua umum tetap memberikan penekanan dan pengawasan sekaligus memberikan semangat kepada seluruh pengurus saya dalam melaksanakan tugas-tugas kebijakan yang sudah disepakati bersama dimasa pandemi ini” (Wawancara 20 November 2022, Abdul Musyawir Yahya).

Kemudian ketua umum DPP IMM pada masa pandemi Covid-19, juga menyatakan melakukan pengarahannya dengan melibatkan bidang-bidang terkait terhadap kebijakan yang dikeluarkan dimasa pandemi, semua kebijakan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan maksimal oleh seluruh kader dan tingkat kepemimpinan.

Sebagaimana hasil wawancara ketua umum DPP IMM Abdul Musyawir Yahya berkaitan dengan Pengarahannya menjelaskan sebagai berikut:

“Mungkin dengan tetap dipantau oleh pengampu bidang terkait dengan melakukan koordinasi secara online dengan pengurus DPD IMM sebagai pelaksana teknis. DPP IMM juga kadang ikut membantu terutama mengenai kendala-kendala agar kegiatan itu tetap terlaksana” (Wawancara 20 November, Abdul Musyawir Yahya).

Fajrus Shodiq juga menambahkan penjelasan diantaranya dalam melaksanakan kegiatan semua bidang terlibat dengan peran yang berbeda-beda sesuai tugas yang sudah diberikan. Sebagaimana dipaparkan oleh Fajrus Shodiq Ketua bidang Kader DPP IMM dijelaskan sebagai berikut :

“Menurut saya dalam melaksanakan kegiatan itu semua tingkatan kepemimpinan itu terlibat mbak, aktif hanya perannya saja yang berbeda-beda,

tapi kalau keikutsertaannya semua terlibat” (Wawancara 4 Desember 2022, Fajrus Shodiq).

Ditambahkan oleh ketua bidang Organisasi DPP IMM Abdullah S Toda bahwa upaya pengoptimalan kebijakan semua bidang-bidang mengikuti arahan dari ketua umum terutama masalah tanggung jawab tugas yang kaitannya dengan kebijakan yang dijalankan masing-masing bidang, seperti bidang organisasi akan mengontrol pelaksanaan bidang organisasi pada pimpinan dibawahnya.

Sebagaimana hasil wawancara ketua bidang Organisasi DPP IMM Abdullah S Toda dijelaskan sebagai berikut :

“Dalam rangka memaksimalkan penerapan kebijakan dimasa covid saya kira, semua bidang-bidang sesuai dengan arahan ketua umum dan pimpinan yang lain mbak, kita masing-masing bidang ini bertanggung jawab penuh dalam memantau kebijakan dan penerapan kebijakan yang di ambil dimasa pandemic. Saya dibidang organisasi tentunya bertanggung jawab dengan semua aturan yang bersifat administrasi organisasi, maka saya akan menggunakan perangkat saya sebagai bidang organisasi dengan melibatkan DPD , Pc dan komisariat yang ada pada grup-grup untuk melaksanakan kebijakan yang sudah di ambil di masa pandemi yang di sepakati tersebut mbak “ (Wawancara 27 November 2022, Abdullah S Toda).

Kemudian dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan-kegiatan organisasi, DPP IMM menggerakkan semua pengurus dan kader dalam mempromosikan kebijakan dan kegiatannya di media sosial, melalui kegiatan diskusi-diskusi virtual dan perangkat media sosial lainnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah S Toda ketua bidang Organisasi DPP IMM dijelaskan sebagai berikut :

“Ya dimasa pandemi itu mbak, setelah dikeluarkan nya kebijakan yang serba digital tersebut, saya kira semua kegiatan kader-kader pasti antusias, karena kami betul-betul membranding gerakan tersebut di media sosial dengan

kemasan yang menarik lagi penting, tentunya banyak sekali yang ikut. Apalagi kegiatan diskusi-diskusi mbak, IMM juga punya forum-forum diskusi mbak untuk menyampaikan gagasan, kritikan dan lain sebagainya, kalau untuk forum diskusi itu dimasa pandemi ditunggu-tunggu kader karena saya sering sekali dapat pesan dari para kader-kader terkait apa yang perlu kita bahas bersama. Kegiatan seminar-seminar juga mbak, kalau dulu sebelum covid sering tapi dengan tatap muka, kalau sekarang lebih banyak online dan offline. Termasuk juga keinginan menjadi anggota dari IMM mbak, sebelum pandemikan dilakukan dengan tatap muka, durasi waktunya lima hari, dimasa pandemi yang serba digital membuat banyak kemudahan-kemudahan, seperti mereka gak ada di kelas, gak bermalaman, namun tetap mendapatkan edukasi, maka intensitas ketertarikannya bertambah untuk bergabung di IMM” (Wawancara 27 November 2022, Abdullah S Toda).

Ditambahkan oleh Abdul Musyawir Yahya dalam rangka mencapai tujuan organisasi maka pengalihan ke media online seperti *Instagram*, menyebarkan *flayer-flayer* menjadi cara yang efektif dalam pelaksanaan aktivitas organisasi dan menjaga semangat para anggota organisasi.

Sebagaimana hasil wawancara bersama ketua umum DPP IMM, Abdul Musawir Yahya dijelaskan sebagai berikut :

“Awal terjadinya Covid-19 saya rasa IMM agak terganggu dalam melaksanakan kegiatan baik berupa tugas kemasyarakatan, organisasi, dan lain sebagainya. Seperti demo, Akhirnya kami berfikir bagaimana mengalihkan semangat kader-kader ini di saat aktivitas serba dibatasi selama masa pandemi. Maka kami melakukan pola Gerakan di media digital mbak, memanfaatkan Instagram, menyebarkan flayer-flayer informasi, baik itu dalam rangka perekrutan anggota, maupun Gerakan sosial dan keilmuan dan sebagainya. Akhirnya semangat kader ini dalam bergerak terfasilitasi, maka selain kegiatan perekrutan anggota , kegiatan yang paling ramai di ikuti itu adalah diskusi-diskusi online dengan berbagai topik pembahasan, pesertanya pun kian luas, dari DPP hingga komisariat ada. aktivitas yang sangat sering dilakukan itu ya seminar dan kajian kajian itu. Ditingkat DPP sampai DPD pun kami juga terlibat Gerakan vaksinasi, pembagian APD dan sebagainya, tentunya dengan protokoler yang ketat, nah Gerakan itu kami syiarkan di media sosial Kemudian bisa dilihat oleh seluruh kader diberbagai tingkatan , tentunya dalam memelihara semangat kader, agar tetap melakukan kegiatan produktif dimasa pandemi” (Wawancara 20 November 2022, Abdul Musyawir Yahya).

Diperkuat oleh jawaban Ketua Bidang Hikmah Baikuni Alshafa bahwasanya dalam memberikan pengarahan masing-masing bidang terlibat secara serius, dikarenakan sudah terintegrasi dengan bidang diberbagai tingkatan kepemimpinan.

Sebagaimana hasil wawancara ketua Bidang Hikmah DPP IMM, Baikuni Alshafa dijelaskan sebagai berikut:

“Kalau untuk peran sendiri tentunya setiap level pimpinan terlibat aktif dalam merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan di IMM ini mbak, mulai dari pimpinan umum dan seluruh pengurus harian, kira-kira begitu, tradisinya kolektif kolegial setiap pimpinan memiliki hak yang sama, dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan, kemudian dalam menjalankan aktivitas organisasi setiap bidang memiliki integrasi, contohnya bidang hikmah dalam menyikapi undang-undang KUHP bidang riset dan bidang hukum HAM terlibat dalam memberikan masukan, itu sedikit contoh dalam model kolektif kolegial, adanya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, artinya saling memberikan kontribusi, itu mbak kira-kira” (Wawancara 21 Desember 2023, Baikuni Alshafa).

Najih Prastiyo juga menerangkan pengarahan yang dilakukan DPP IMM bertujuan agar kebijakan yang dilakukan terlaksana, dan juga memberikan pembelajaran tanggung jawab kepada masing-masing bidang dalam organisasi dalam melaksanakan kebijakan.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam IMM itu kan sangat kompleks mbak ya, semua aktivitas organisasi terwakili oleh bidangnya, misalnya bidang kader mewakili persoalan kaderisasi, begitu juga dengan bidang yang lain. Maka aspek pengarahan menjadi penting untuk dilakukan selain bentuk dalam upaya menjalankan kebijakan, hal tersebut juga bertujuan agar secara substansi kebijakan tersebut selalu sesuai tidak lari dari orientasi kebijakan itu dibentuk, maka pengarahan biasanya diberikan oleh pimpinan umum, nanti dilanjutkan oleh bidang-bidang terkait dan tingkat kepemimpinan dibawahnya. Biasanya dalam IMM itu juga pengarahan itu

sekaligus sebagai media pembelajaran dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen dalam optimalisasi menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama-sama” (Wawancara, 12 Februari 2023, Najih Prastiyo Pengurus Pemuda Muhammadiyah).

Berdasarkan wawancara diatas mengenai pengarahannya komunikasi kebijakan, dalam pengarahannya kebijakan DPP IMM memberikan pengarahannya dimulai dari ketua umum secara umum dan ketua-ketua bidang secara khusus terkait dengan pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut dikeluarkan. Pengarahannya ini ada yang bersifat personal seperti ketua umum melakukan telpon secara langsung kepada kepengurusannya dibawahnya, juga pengarahannya yang bersifat keorganisasian dengan menggunakan metode rapat yang di inisiasi oleh ketua bidang terkait.

4. Controlling (Pengawasan)

Dalam melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan dimasa pandemi Covid-19 DPP IMM telah melakukan controlling diberbagai tingkat kepemimpinan dan bidang-bidang terkait dengan terus melakukan koordinasi yang aktif, koordinasi aktif tersebut menggunakan *Whatsapp Grup* dan perangkat *group-grup* yang dimiliki oleh bidang-bidang terkait sesuai dengan tingkatan kepemimpinannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua umum DPP IMM Abdul Musyawir Yahya dijelaskan sebagai berikut :

“Tentunya memantau secara aktif lewat bidang yang bersangkutan, agar kebijakan dan keputusan organisasi betul-betul dilaksanakan dengan baik dan tujuannya tercapai. Contohnya saya akan meminta bidang terkait untuk intens telpon kedaerah bahkan sampai ke tingkat cabang manakala disuatu daerah

agak lambat dalam melaksanakan kebijakan, artinya koordinasi saling memberikan informasi baik di DPP sampai kebawah. Mengingat and terus memantau secara aktif adalah bagian dari cara kami dalam memsatkan semua komunikasi dan informasi ini terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, kami juga mempunyai banyak grup whatsapp, saya kira ini membantu kami dalam mengontrol dan berkomunikasi secara organisasi terutama dalam memastikan kebijakan kami terlaksana. Secara khusus terkait pengawasan itu maka bidang bidang terkait juga terlibat aktif misalnya jika ada keputusan yang berkaitan dengan bidang organisasi maka ketua bidang organisasi DPP IMM bersama ketua bidang organisasi DPD se Indonesia akan melakukan monitoring dengan aktif,, bidang kader pun begitu mereka akan menguunakan seluruh perangkatnya untuk saling berkoordinasi, karena kami sudah saling terintegrasi maka komunikasi akan menjadi lebih terbuka dan mudah, itu mempermudah kami dalam melakukan pengawasan dalam memastikan kebijakan kami terlaksana pada seluruh kader mbak. apalagi sekarang semua bidang itu sudah ada gruopnya maka, koordinasi dan memonitor itu akan mudah melakukannya” (Wawancara 20 November 2022, Abdul Musyawir Yahya).

Hal ini juga disampaikan oleh Fajrus Shodiq, bahwa dalam melakukan kontrol ada koordinasi yang aktif antara tingkatan kepemimpinan mulai dari DPP sampai komisariat.

Sebagaimana dijelaskan oleh ketua bidang Kader DPP IMM Fajrus Shodiq, dijelaskan sebagai berikut:

“Saling berkoordinasi mbak, antara DPP dan DPD, DPD dengan cabang, cabang dengan komisariat. Sehingga tujuan dan maksud dari kebijakan itu tersampaikan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan itu dibuat” (Wawancara 4 Desember 2022, Fajrus Shodiq).

Dalam pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan dimasa pandemi tersebut akan dievaluasi dan diberikan masukan jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Dalam melakukan kontrol DPP IMM juga melakukan pengoptimalisasian pada *Grup Whatsapp* yang dimiliki bidang, saling berkirim informasi lewat email manakala ada kendala yang harus segera dilakukan evaluasi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua Bidang Organisasi DPP IMM

Abdullah S Toda dijelaskan sebagai berikut ;

“Jadi mbak, di kita itu sudah terhubung dengan Whatsaap Group perbidang, dan email DPD juga. Tentunya untuk langkah awal kami akan memantau lewat Group Whatsaap baik dengan chat atau memastikan kebijakan itu dijalankan, jika pun ada kendala kami akan secepat mungkin mengetahui kendala dan akan diberikan solusi baru kembali. IMM tentunya melakukan koordinasi terkait perkembangan dan hambatan yang terjadi. Selain itu karena IMM menganut sistem yang semua keputusan itu harus musyawarah dan mufakat dengan melibatkan bidang bidang terkait didalamnya” (Wawancara, 27 November 2022, Abdullah S Toda).

Lebih lanjut oleh Abdul Musyawir Yahya menjelaskan dalam melakukan evaluasi DPP IMM secara keorganisasian melaksanakannya pada rapat pleno dan rapat harian yang estimasi waktunya satu kali dalam satu bulan untuk rapat pleno dan satu kali dalam satu minggu untuk rapat harian.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua Umum DPP IMM, Abdul Musawir Yahya dijelaskan sebagai berikut :

“Kalau untuk evaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh DPP IMM biasanya ada yang namanya rapat Pleno itu biasanya satu kali dalam sebulan. Kalau rapat pimpinan harian itu tergantung situasi dan agenda yang akan diadakan oleh anggota organisasi. Aturan terkait evaluasi kegiatan atau kebijakan itu biasanya dilakukan dalam rapat Pleno tadi, yang dimulai dengan melaporkan hal tersebut itu tentunya bidang yang terkait dengan kebijakan tersebut. Contohnya, di daerah A kami nilai belum melaksanakan kebijakan yang sudah kami keluarkan. Maka terlebih dahulu bidang yang terkait akan mengadvokasi dengan cara bertelpon atau memantau pada grup-grup online yang sudah ada, jika ditemukan masalah, maka DPP akan mengundang daerah yang bersangkutan untuk mengadakan rapat. Disitulah dijelaskan seluruh alasan kenapa kebijakan itu tidak bisa dijalankan. Maka kami akan memberi solusi dari masalah tersebut dan juga akan membantu dalam realisasi kebijakan tersebut. Misalnya kendalanya di pemateri kami akan sediakan pemateri, atau instruktur, kami akan sediakan instruktur” (Wawancara 20 November 2022, Abdul Musyawir Yahya).

Ketua Bidang Hikmah DPP IMM menjelaskan tentang pola pengawasan yang dilakukan DPP IMM dalam melakukan pengawasan kebijakan di masa pandemi Covid-19. Pola pengawasan yang dilakukan dengan saling berkoordinasi dengan bidang yang saling berkaitan yang nantinya akan memberikan laporan pertanggungjawaban.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Bidang Hikmah DPP IMM, Baikuni Alsafa dijelaskan sebagai berikut:

“Tentunya mbak kita kan saling koordinasi, memastikan kebijakan yang kita keluarkan itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Koordinasi ini biasanya semua pihak atau bidang yang bersinggungan akan terlibat untuk mensosialisasikan kebijakan agar terlaksanakan. Kalau DPP secara umum kan memperbolehkan kaderisasi secara online, pelaksanaan musyawarah-musyawah yang online, baik ditingkat cabang dan komisarat nah itu nanti ada laporan nya dari setiap pimpinan nya, nah begitu juga evaluasi tanggung jawab masing-masing bidang. Kalau bidang hikmah gerakan advokasi kasus-kasus agrarian missal dimasa pandemi, jadi melakukan pendampingan, membantu vaksinasi begitu-begitu” (Wawancara 21 Desember 2023, Baikuni Alsafa).

Kemudian, Alsafa memperkuat lagi jawabannya masih terkait pengawasan kebijakan, dimana masing-masing bidang terkait bertugas mengawasi dengan cara melaporkan kembali kebijakan kepada pimpinan umum jika ada hal-hal yang harus di evaluasi.

Sebagaimana ketua Bidang Hikmah DPP IMM Baikuni Alsafa, dijelaskan sebagai berikut:

“Masing-masing bidang terkait mbak yang paling bertugas mengawasi, pun juga nanti dilaporkan kepada pimpinan umum, barangkali ada yang haus di evaluasi dan sebagainya” (Wawancara 21 Desember 2023, Baikuni Alsafa).

Untuk keabsahan data penelitian terkait *Controlling* komunikasi kebijakan DPP IMM ini juga dilakukan wawancara dengan Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo yang menerangkan bahwa dalam mengontrol kebijakan IMM biasanya melakukan kontrol yang ketat, dan evaluasi yang terukur. Kontrol dan evaluasi itu dilakukan baik secara formal maupun pendekatan keorganisasian yang dilakukan lewat rapat gabungan internal organisasi.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Najih Prastiyo dijelaskan sebagai berikut:

“Setahu saya dalam IMM itu kontrolnya sangat intens ya mbak, karena masing-masing pengurus tersebut sudah sangat dekat. Jadi biasanya bertelpon secara langsung menanyakan tentang perkembangan pelaksanaan tersebut itu sangat mudah dan biasa dilakukan. Biasanya itu dilakukan selain untuk menanyakan perkembangan penerapan kebijakan, juga bagian dalam menggali informasi, biasanya tentang kendala dalam penerapan sebuah kebijakan tersebut. Nantinya jika ditemukan kendala biasanya persoalan tersebut akan dibawa dalam rapat organisasi. Setahu saya itu rapat pleno atau rapat harian. Pada aktivitas kontrol ini IMM sangat konsisten dibanding organisasi otonom Muhammadiyah yang lain, mungkin karena semua anggotanya mahasiswa jadi militansinya agak lebih tinggi.” (Wawancara, 12 Februari 2023, Najih Prastiyo).

Berdasarkan wawancara diatas mengenai pengawasan bahwasanya DPP IMM memastikan kebijakan yang dikeluarkan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran dengan meminta laporan pertanggungjawaban kepada masing-masing bidang terkait. Dalam melakukan evaluasi kebijakan DPP IMM menggunakan dua metode rapat yaitu rapat pleno dan rapat harian yang waktu pelaksanaannya satu kali dalam satu bulan untuk rapat pleno dan satu kali dalam satu minggu untuk rapat harian, yang nantinya akan dihadiri oleh masing-masing bidang dalam menyampaikan

pelaksanaan kebijakan dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan manakala terdapat kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

C. Pembahasan

a. *Planning* (Perencanaan)

Pada aspek *Planning* dalam menentukan tujuan dan sasaran utama organisasi agar berhasil, termasuk mengembangkan strategi, menetapkan kebijakan, merencanakan, dan petunjuk umum untuk menggiatkan jalannya organisasi (Roesanto, 2021). Dalam tahap ini, perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan DPP IMM sebelum seluruh aktivitas organisasi dijalankan, dengan cara menetapkan dengan langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan, agar tujuan dapat tercapai dengan efisien. Dalam konteks ini DPP IMM sebagai pimpinan yang paling tinggi didalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berfungsi sebagai sumber kebijakan dan sebagai sumber penentu gerakan dan tujuan dalam organisasi. Dimana tujuan dari aktivitas organisasi IMM itu sendiri membentuk mahasiswa yang intelektual, pemimpin yang kritis, yang religius dan beradab melalui kegiatan-kegiatan organisasi.

Pada masa pandemi Covid-19 DPP IMM mengalami kendala-kendala besar terutama mengenai aktivitas-aktivitas pokok organisasi, yang tentunya menghambat IMM dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Aktivitas-aktivitas pokok tersebut diantaranya, tidak bisa melakukan perekrutan anggota,

melaksanakan tingkatan perkaderan seperti melaksanakan Darul Arqom Dasar, Darul Arqom Madya dan Darul Arqom Paripurna, serta perkaderan pendukung lainnya dan juga melaksanakan diskusi-diskusi yang bersifat tatap muka seperti, seminar-seminar, pelaksanaan pergantian kepemimpinan seperti MUKTAMAR, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Komisariat. Karenanya sebelum mengeluarkan kebijakan strategis organisasi yang berguna untuk mengatasi sejumlah persoalan pada organisasi tersebut, terlebih dahulu DPP melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan dan kondisi organisasi di masa pandemi. Kajian perencanaan kebijakan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan agenda rapat internal organisasi yang melibatkan seluruh pengurus DPP IMM. Perencanaan ini disusun dan didiskusikan oleh pimpinan umum DPP IMM dan bidang-bidang terkait yang ada didalamnya seperti, bidang kaderisasi, bidang organisasi dan lain-lain.

Kemudian dalam menetapkan perencanaan kebijakan, DPP IMM melakukan musyawarah mufakat dalam memutuskan suatu kebijakan. Seterusnya dalam mensosialisasikan kebijakan yang diambil DPP IMM menggelar rapat gabungan bersama DPD se-Indonesia dengan menggunakan metode online seperti zoom meeting dan metode hibryd (online dan offline).

Dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan terhadap kebijakan baru DPP IMM melalui bidang-bidangnya juga meneruskan koordinasi dengan melakukan rapat bersama bidang-bidang pada pimpinan DPD nya. Koordinasi dengan memanfaatkan media sosial ini merupakan cara DPP IMM dalam

mensosialisasikan kebijakan, serta melakukan perencanaan kebijakan dimasa pandemi Covid-19 dalam rangka menjaga setabilitas aktivitas organisasi dan mengupayakan agar tujuan organisasi tercapai selama masa pandemi Covid-19.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian menentukan secara spesifik aktivitas atau kebutuhan untuk mencapai sasaran atau hasil yang akan dicapai organisasi. Tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk menyusun pelaksanaan rencana kegiatan melalui pembagian serta pendelegasian tugas dan wewenang yang sesuai dengan kebijakan organisasi tersebut (Roesanto, 2021). Sejalan denga napa yang disampaikan setelah merumuskan melakukan kajian tentang perencanaan kebijakan DPP IMM melakukan pembagian tugas dan wewenang dimana, DPP IMM melibatkan DPD, Pimpinan Cabang hingga Komisariat dalam menjalankan kebijakan yang sudah dikeluarkan dimasa pandemi Covid-19.

Pembagian tugas dan wewenang ini dimulai dari koordinasi ketua umum bersama ketua umum pada tingkatan DPD melalui rapat internal secara zoom meeting dan media group whatsapp terkait sosialisasi kebijakan secara umum, dan meminta ketua umum masing-masing daerahnya menyebarkan hingga ke cabang-cabang dengan metode menyelenggarakan rapat internal serupa. Selanjutnya bidang-bidang yang ada dimasing-masing tingkatan kepemimpinan melanjutkan rapat internal sesuai dengan bidangnya untuk membahas secara teknis dan spesifik terkait dengan pelaksanaan kebijakan, dimulai dari DPP dan DPD seperti bidang

kader melaksanakan rapat internal, bidang organisasi, bidang hikmah melanjutkan rapat koordinasi tersebut pada bidang yang serupa di tingkat DPD dengan cara memanfaatkan media digital seperti zoom meeting dan group whatsapp, dimana rapat internal itu membahas terkait pensosialisasian kebijakan dan tata cara pelaksanaan kebijakan. Dalam pembagian tugas dan wewenang ini pengurus bidang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh DPP IMM agar kebijakan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan organisasi.

c. *Directing* (Pengarahan)

Secara umum pengarahan adalah perilaku anggota organisasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi dan sesuai kebutuhan, rencana, maupun desain. Tahap ini membimbing kegiatan sesuai tujuan pekerjaan agar kegiatan dapat terlaksana dengan efisien dan tepat sasaran (Roesanto, 2021).

Pada tahapan pengarahan ini DPP IMM melakukan koordinasi secara aktif kepada DPD hingga Pimpinan Cabang dan komisariat dengan cara berkomunikasi secara personal maupun melakukan komunikasi secara kelompok (grup-grup whatsapp dan zoom meeting). Pengarahan secara aktif dilakukan dengan menggerakkan pengurus dimasing-masing bidang. Pengarahan efektif dilakukan dikarenakan masing-masing tingkat kepengurusan dalam melaksanakan kebijakan mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam tata pelaksanaan kebijakan dikarenakan sumber daya kader yang berbeda-beda. Untuk mengantisipasi itu DPP IMM melakukan Advokasi dimasing-masing daerah dengan meminta keterangan

kepada pengurus IMM di daerah dan cabang terkait perkembangan pelaksanaan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pengurus di daerah dan cabang hingga komisariat selama melaksanakan kebijakan, yang nantinya lewat informasi tersebut akan diberikan solusi yang tepat agar aktivitas organisasi bisa berjalan dan tujuan organisasi bisa tercapai.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Kegiatan yang dilakukan oleh pengurus organisasi untuk mengetahui apakah aktivitas organisasi dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan dan dilakukan oleh anggota organisasi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam tahap ini merupakan tahap mengawasi pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan, apabila terjadi kendala atau penyimpangan, dapat segera diperbaiki dan di arahkan kembali sesuai dengan rencana semula (Roesanto, 2021). Dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan DPP IMM memberikan tugas kepada masing-masing bidang di masing-masing tingkatan kepemimpinan seperti DPD, Cabang dan komisariat. Tugas yang diberikan diantaranya melaksanakan kebijakan, dan melaporkan kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti bidang kader DPP IMM mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh bidang kader DPD, cabang hingga komisariat. Bidang organisasi DPP IMM mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang organisasi DPD, cabang, hingga komisariat. Ketua umum mengawasi Ketua DPD, cabang dan komiariat dalam melakukan pengawasan secara

keseluruhan. Dalam komunikasi melakukan pengawasan kebijakan di masa pandemi Covid-19 DPP IMM juga menggunakan metode online, baik dalam melakukan rapat, penyebaran informasi termasuk dalam melakukan telpon secara personal. Dalam melakukan pengawasan DPP IMM memiliki dua jadwal rapat evaluasi dimana diselenggarakan dalam satu kali per satu minggu dan satu kali dalam datu bulan. Rapat evaluasi pertama dinamakan dengan rapat harian, dimana kendala-kendala yang diperoleh informasinya dari daerah-daerah akan di bahas bersama-sama dan mempersiapkan solusi dari masalah tersebut. Rapat kedua bernama rapat pleno dimana evaluasi-evaluasi dan solusi-solusi itu ditetapkan menjadi sebuah kebijakan organisasi.

